

Implikasi penguasaan sumberdaya ekonomi terhadap dirupsi identitas politik lokal (Kajian terhadap penguasaan *economic capital*, *social capital*, dan *political strategy* untuk memenangkan suara pemilih dalam Pilkada serentak Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Jayawijaya)

Eduard Kocu^{1*}

¹Universitas Cenderawasih, Indonesia

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 10 Juli 2024

Disetujui 4 Agustus 2024

Diterbitkan 30 Agustus 2024

Penulis Korespondensi*:

Eduard Kocu

Universitas Cenderawasih,
Indonesia

edward.kocu@gmail.com



©2025 Eduard Kocu. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

ABSTRAK

Pilkada serentak di Papua periode 2018–2020 menunjukkan fenomena menarik, yakni kemenangan calon non-pribumi atas kotak kosong di Kabupaten Jayawijaya (2018) dan Kabupaten Raja Ampat (2020). Fenomena ini bertentangan dengan semangat Otsus, yang menekankan penguatan identitas lokal dan representasi politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penentu kemenangan calon bupati terpilih serta bentuk polarisasi politik lokal di kedua daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, dengan populasi pemilih yang diperoleh dari total suara di semua TPS kedua kabupaten. Analisis data dilakukan melalui tahap pengeditan, pengelompokan, dan pemrosesan menggunakan Model Sarantakos. Temuan menunjukkan bahwa kendali atas sumber daya ekonomi merupakan faktor utama yang menentukan kemenangan calon bupati di Kabupaten Raja Ampat (78%) dan Kabupaten Jayawijaya (55%), diikuti oleh investasi politik (41%). Kesimpulannya, kesuksesan calon lebih dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi daripada identitas lokal. Penelitian ini merekomendasikan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin di Papua dengan bekal penguasaan sumber daya ekonomi yang memadai.

Kata Kunci: Pilkada Papua, Sumber daya ekonomi, Investasi politik, Identitas lokal, Otonomi khusus

ABSTRACT

The simultaneous regional elections in Papua (2018–2020) period showed an interesting phenomenon: the victory of non-indigenous candidates over empty boxes in Jayawijaya (2018) and Raja Ampat (2020). This phenomenon contradicts the spirit of Special Autonomy, which emphasizes the strengthening of local identity and political representation. This study analyzes the determinants of elected regent candidates' victories and the form of local political polarization in both regions. This study uses a mixed-methods approach, with the voter population derived from total votes across all polling stations in both regencies. Data analysis was carried out through editing, grouping, and processing stages using the Sarantakos Model. Findings indicate that control over economic resources is the main factor determining the victory of elected regent candidates, 78% in Raja Ampat and 55% in Jayawijaya, followed by political investment (41%). In conclusion, candidates' success is more influenced by economic power than by local identity. This study recommends that every citizen should have the same opportunity to lead in Papua with adequate control over financial resources.

Keywords: Papua regional elections, Economic resources, Political investment, Local identity, Special autonomy

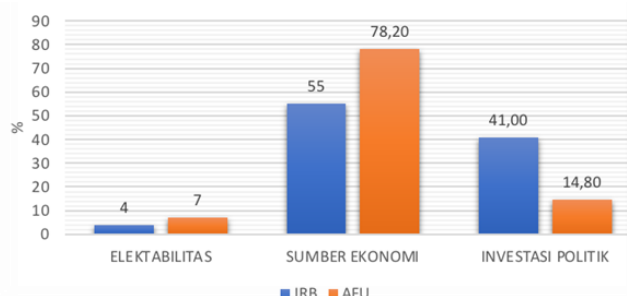
PENDAHULUAN

Pilkada merupakan salah satu bentuk pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi (gubernur), kabupaten (bupati), dan kota (walikota) yang dilakukan secara demokratis (Wakhid et al., 2017). Pilkada ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Realitas Politik dalam pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) serentak di Papua periode 2018-2020 memunculkan sejumlah fenomena menarik yang layak untuk dikaji secara ilmiah. Salah satunya tampak pada hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2018 dan hasil Pilkada kabupaten Kepulauan Raja Ampat pada tahun 2020. Kedua kabupaten tersebut memiliki kesamaan fenomena yang menarik untuk diperhatikan, meskipun pelaksanaan kedua Pilkada tersebut berlangsung dalam waktu yang berbeda.

Keunikan tersebut terletak pada kotak kosong yang menjadi lawan calon bupati di kedua wilayah. Selain itu, yang jauh lebih menarik adalah bahwa calon bupati di masing-masing wilayah, bukan merupakan putra asli daerah setempat. Fenomena tersebut tidak sejalan dengan semangat otonomi khusus (Otsus) yang bertujuan memperkuat identitas dan representasi politik lokal. Terlebih lagi fenomena tersebut didukung oleh hasil Pilkada di kedua daerah yang justru dimenangkan oleh calon bupati yang bukan berasal dari daerah setempat. Apapun strategi yang digunakannya, hasil tersebut menunjukkan kemenangan atas kotak kosong.

Merujuk pada hasil penelitian di lapangan yang disajikan pada gambar 1, keberhasilan kedua Bupati terpilih di Papua didasari oleh kemampuannya dalam menguasai sumber daya ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 78% keberhasilan Bupati terpilih di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat ditentukan oleh penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. Sementara itu, kemenangan bupati terpilih di Kabupaten Jayawijaya lebih banyak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu penguasaan sumberdaya ekonomi (55%) dan investasi politik (41%).



Gambar 1. Hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat Tahun 2018 dan Tahun 2020

Bagaimanapun juga, dapat dipahami bersama bahwa biaya politik dalam Pilkada merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemenangan seorang kandidat, walaupun faktor tersebut tidak mutlak dan masih dapat diperdebatkan. Idealnya, Pilkada sebagai instrumen demokrasi seharusnya menjadi sarana dalam penguatan identitas politik lokal (Romli & Faiddi, 2025). Akan tetapi kenyataannya, di kedua daerah tersebut tidak menunjukkan adanya partisipasi dan representasi yang kuat dari identitas politik lokal, khususnya keterlibatan orang asli daerah setempat dalam kontestasi politik lokal (Pilkada).

Fenomena tersebut sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Sadiyatunnimah (2021) yang menyatakan bahwa kombinasi modal jika disertai dengan strategi yang baik dalam memanfaatkannya akan menjadi faktor utama yang mendorong kemenangan calon dari dinasti politik. Selain itu, Sari et al. (2025) menemukan bahwa partai politik yang berasal dari keluarga bangsawan dengan jaringan sosial yang luas dan kondisi

ekonomi yang memadai dapat menjadi sebuah kekuatan bagi partai politik tersebut, terkhusus dalam menggerakkan dukungan masyarakat. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Komarudin, Handoko, and Hussain (2025) yang menyatakan bahwa di Kabupaten Subang sebanyak 69,75% responden penelitian mengakui bahwa intensif finansial berpengaruh sangat kuat terhadap penentuan keputusan pemilihan calon kepala daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi celah dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek modal politik, dinasti, dan pengaruh finansial dalam kemenangan kontestasi lokal. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus untuk menelaah secara mendalam proses penyelenggaraan Pilkada, terkhusus pada tahap pendaftaran hingga penetapan calon bupati yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum, yaitu Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten sebagai pemegang otoritas utama. Dalam konteks ini, KPU hanya menetapkan satu pasangan calon bupati di masing-masing daerah. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah indikator yang dapat diuji serta dijadikan parameter dalam mengukur keberhasilan Bupati terpilih dimasing-masing kabupaten. Indikator yang dimaksud meliputi, indikator elektabilitas, investasi politik, dan penguasaan sumberdaya ekonomi politik.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena konfigurasi politik yang hanya menghadirkan satu calon kandidat berimplikasi langsung pada terbatasnya representasi politik lokal dan melemahnya kompetisi demokratis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka tabir pengetahuan bagi setiap anak bangsa bahwa mereka punya peluang yang sama untuk memimpin di Papua, tanpa harus dibatasi oleh latar belakang kedaerahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban ilmiah atas faktor-faktor yang menentukan kemenangan para bupati terpilih. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bentuk polarisasi politik lokal yang terjadi di tengah masyarakat kedua daerah tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan terkait pengembangan bidang Ilmu Politik yang berkaitan dengan studi politik lokal dan perilaku politik masyarakat dalam konteks demokrasi. Secara praktis, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang dinamika politik lokal, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang ada di kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi calon-calon pemimpin daerah dari berbagai kalangan dalam memahami strategi politik dan dinamika sosial yang mempengaruhi keberhasilan dalam kontestasi Pilkada di Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*Mixing Methods*). Penelitian ini berfokus pada hasil pemilihan kepala daerah secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan Raja Ampat. Dasar argumentasi dan perumusan hipotesis mengacu pada hasil perolehan suara dari seluruh TPS yang tersebar di kedua wilayah. Populasi dalam penelitian ini adalah para pemilih (*voters*) yang terlibat langsung melalui suara sah yang terekam dalam hasil perolehan suara bupati terpilih di kabupaten Jayawijaya dan Raja Ampat.

Analisis pengolahan data dalam penelitian ini merujuk pada empat langkah utama kerangka analisis penelitian sosial menurut Sarantakos (1993). Langkah pertama dalam proses pengolahan data ini, yaitu proses persiapan data yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap editing, tabulasi, dan analisis data. Tahap editing sebagai tahap awal dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan jawaban responden. Kemudian, data bersih ditabulasi dan disusun sesuai indikator dan variabel penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis.

Lalu, pada langkah kedua dilakukan proses analisis data secara deskriptif. Pada tahap ini mencakup perhitungan frekuensi dan persentase untuk menggambarkan pola dasar data dan kecenderungan jawaban dari responden. Dalam menghitung persentase setiap

jawaban responden, peneliti menggunakan rumus berikut untuk menganalisis data per indikator.

$$P = \frac{f_i}{\sum f_i} \times 100$$

keterangan:

P = Persentase.

f_i = Jumlah nilai tiap indikator.

$\sum f_i$ = Total nilai seluruh indikator.

Selanjutnya, dilakukan analisis hubungan antarvariabel. Pada tahap ini, peneliti menelaah keterkaitan antarvariabel penelitian dengan menerapkan rumus tabulasi data per variabel untuk melihat pola distribusi dan perbedaan kontribusi antar indikator. Terakhir, yaitu tahap interpretasi data, dimana hasil analisis kemudian ditafsirkan dengan teori serta kondisi empiris untuk membangun pemahaman yang komprehensif. Penggunaan kerangka analisis Sarantakos ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kedua variabel yang saling memengaruhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pilkada Kabupaten Kepulauan Raja Ampat 2020

A. Dukungan Partai Politik (Parpol)

Partai politik merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang hendak mencalonkan diri misalnya menjadi seorang calon bupati, sehingga siapapun yang maju dalam Pilkada, wajib mendapatkan partai sebagai kendaraan politik (Listianingsih, 2021). Sementara itu, realitas politik di kabupaten Kepulauan Raja Ampat sangatlah unik, karena mayoritas partai politik sepenuhnya hanya mendukung satu pasangan calon bupati dalam Pilkada 2020.



Gambar 2. Partai Pendukung

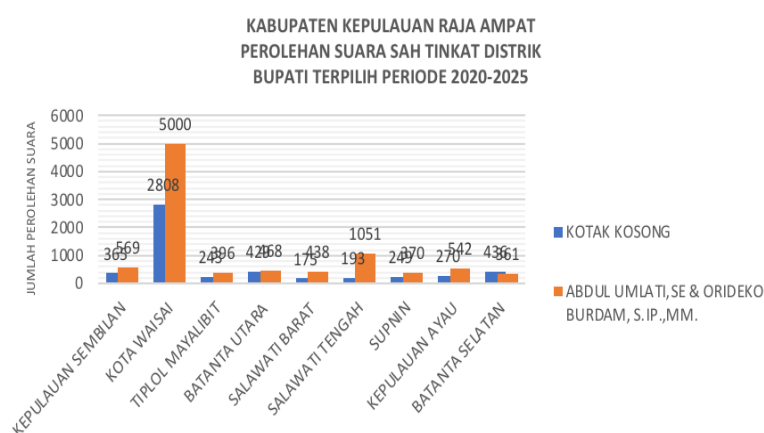
Sebagaimana data yang ditunjukkan pada gambar 2, partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen (DPR) kabupaten Kepulauan Raja Ampat bersepakat untuk mengusung pasangan calon Abdul Faris Umlati, SE., dan Orideko Iriano Burdam, S.IP.,MM., sebagai calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten Kepulauan Raja Ampat periode 2020-2025. Kandidat calon bupati merupakan seorang petahana yang merupakan kader Partai Demokrat dengan latar belakang sebagai seorang penguasa yang kemudian masuk kedalam partai politik, dan selanjutnya mengawali karir politiknya sebagai anggota DPR kabupaten Kepulauan Raja Ampat sebelum kemudian menyalonkan dirinya sebagai calon bupati, lalu terpilih sebagai bupati pada periode pertama. Beliau kini (pada tahun 2022) sedang menjabat sebagai ketua DPD Demokrat provinsi Papua Barat.

Sedangkan untuk kandidat calon wakil bupati merupakan seorang birokrat yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat dengan jabatan terakhirnya sebagai kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ini adalah perpaduan birokrator dan

politisi yang nantinya dapat membangun sinergitas antar eksekutif dan legislatif secara efektif karena ditopang oleh kemampuan dan pengalaman keduanya. Fakta ini mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Setiajid (2022), yang menemukan bahwa apabila calon kandidat yang merupakan seorang petahana dan telah memiliki prestasi serta pengalaman, maka calon kandidat tersebut telah memiliki citra yang baik di mata masyarakat dan partai politik, sehingga memudahkan bagi calon kandidat tersebut untuk mendapatkan dukungan penuh dari partai politik dan masyarakat.

B. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap pasangan calon terpilih dapat diukur melalui perolehan suara sah yang diraih. Perolehan suara tersebut menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kepulauan Raja Ampat pada periode 2020-2025 dalam Pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 09 April 2020.



Gambar 3. Dukungan Suara

Sumber: KPU Kabupaten Kepulauan Raja Ampat

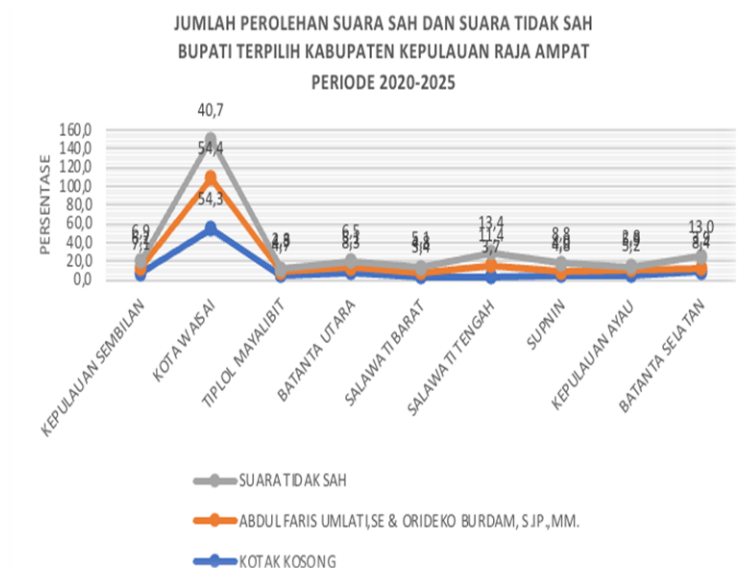
Bila mencermati hasil perolehan suara sah yang diraih oleh kedua pasangan calon, baik kotak kosong maupun sang petahana, sebagaimana diperlihatkan oleh data pada gambar 3, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dukungan dari semua partai politik yang diberikan secara menyeluruh kepada salah satu pasangan ternyata berbanding terbalik dengan dukungan masyarakat. Hal tersebut terbukti melalui jumlah perolehan suara yang diraih oleh kotak kosong diseluruh TPS yang terekap di setiap tingkat distrik. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan pada tingkat partai tidak diikuti dengan keseriusan para partai pendukung di tingkat akar rumput untuk meyakinkan masyarakat terkait visi dan misi yang diusung oleh sang calon bupati dan calon wakil bupati yang mereka dukung.

Data menunjukkan bahwa perolehan suara yang diraih oleh Abdul Umlati dan Orideko Burdam di 9 distrik yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, relatif berimbang di 7 distrik. Hanya 2 distrik yang terlihat menunjukkan perolehan suara yang signifikan, yaitu di distrik Kota Waisai dan distrik Salawati Tengah, dengan jumlah perolehan suara yang diraih oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati terhadap kotak kosong di distrik Kota Waisai sebesar 97%. Hanya terpaut 42.4% dari perolehan suara yang diraih oleh kotak kosong.

Bila dicermati lebih detail, perolehan suara dari kotak kosong, suara pasangan calon tunggal, serta jumlah suara tidak sah, dapat menjadi pembandingan untuk menjelaskan keberhasilan politik dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Raja Ampat tahun 2020. Dengan membandingkan suara sah yang diraih dan suara tidak sah, hal tersebut dapat menjadi penilaian bagi sebuah bentuk praktek demokrasi yang berjalan efektif atau tidak (Agustino, Hikmawan, dan Silas 2023). Disisi lain, perbedaan dan selisih antar ketiganya bisa dijadikan sebagai ukuran bagi keberhasilan pasangan calon tunggal yang diusung oleh mayoritas partai politik pemilik kursi dominan dalam parlemen

Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.

Untuk memahami perbandingan antara suara sah dan suara tidak sah, disajikan data statistik pada gambar 4 dalam bentuk *line graph*. Suara tidak sah jumlahnya merata di seluruh distrik, bahkan sangat tinggi di wilayah dengan perolehan suara tertinggi bagi masing-masing kandidat, baik kota kosong maupun pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Kondisi ini terjadi di distrik Kota Waisai yang merupakan Ibukota Kabupaten Kepulauan Raja Ampat dengan jumlah DPT terbanyak serta jumlah suara sah terbanyak. Lebih menarik lagi, 40.7% suara tidak sah terbanyak berada di daerah yang seharusnya menjadi barometer bagi distrik lain karena tentu jauh lebih baik dari aspek SDM pilih, fasilitas, serta sosialisasi terkait alat peraga dan kontrol terhadap pelaksanaan Pilkada.

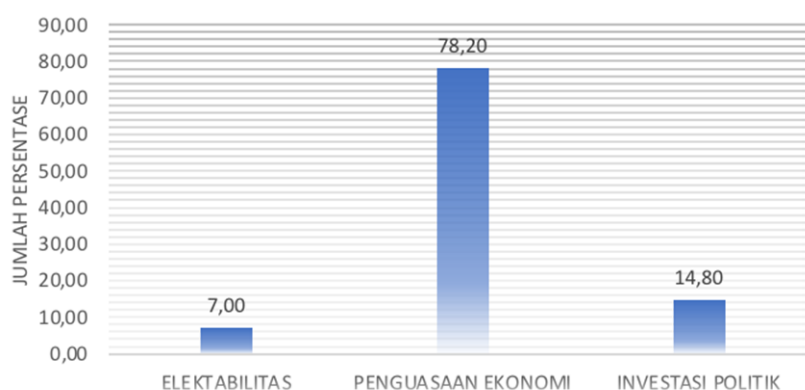


Gambar 4. Perbandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah

Sumber: KPU Kabupaten Kepulauan Raja Ampat

C. Faktor Penentu Kemenangan

Berdasarkan hasil survei *online* yang dilakukan kepada 500 responden secara acak melalui media sosial dengan karakteristik responden yang bervariasi mulai dari mahasiswa hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya termasuk perangkat kampung, diperoleh informasi sebagaimana tergambar secara statistik pada gambar 5.



Gambar 5. Faktor Penentu Kemenangan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Raja Ampat Periode 2020-2025

Dari data statistik tersebut dapat diketahui bahwa faktor penentu kemenangan bupati dan wakil bupati terpilih ditentukan oleh penguasaan terhadap sumberdaya

ekonomi. Fakta ini dibuktikan oleh dengan nilai persentase penguasaan ekonomi yang mencapai angka 78.20%. Data ini juga diperkuat oleh latar belakang calon bupati yang merupakan seorang petahana dan seorang pengusaha yang tentu memiliki modal ekonomi lebih kuat untuk maju dalam Pilkada. Disisi lain, pasangan calon ini merupakan seorang ketua partai politik di tingkat kabupaten dan juga provinsi. Tentu hal ini sangat menguntungkan, karena semua yang diperlukan bagi seorang calon bupati ada dalam genggamannya sendiri.

Temuan penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Wanta (2020), yang melakukan analisis terhadap modalitas dan strategi yang dilakukan oleh kandidat Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018. Studi tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan seorang petahana dapat dimanfaatkan oleh para kandidat untuk merebut dukungan dari masyarakat juga partai politik, bahkan kepemilikan modalitas bisa membuat kandidat tidak memiliki lawan sama sekali dan hanya berhadapan dengan kotak kosong.

2. Pilkada Kabupaten Jayawijaya 2018

Jhon Richard Banua dan Martin Yogobi adalah pasangan tunggal yang maju dalam Pilkada Kabupaten Jayawijaya dalam Pilkada serentak tahun 2018. Jhon Richard Banua (JRB) menang telak terhadap kotak kosong yang menjadi rivalnya, dengan total perolehan suara sah 260.012 atau setara 99.13%. Sedangkan, kotak kosong hanya mengantongi 2.271 suara sah atau setara dengan 0.87%, dari total suara sah 262.283. Saudara calon bupati JRB merupakan seorang petahana yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati selama dua periode, mendampingi Wempi Wetipo sebagai bupati Kabupaten Jayawijaya dengan masa bakti 2008-2018. Kemenangan JRB terhadap kotak kosong yang hampir dikatakan 100% mendeklarasikan bahwa dirinya sebagai satu-satunya calon tunggal yang menang telak terhadap kotak kosong tertinggi se-Indonesia dalam Pilkada serentak pada tahun 2018.



Gambar 5. Lokasi Pilkada

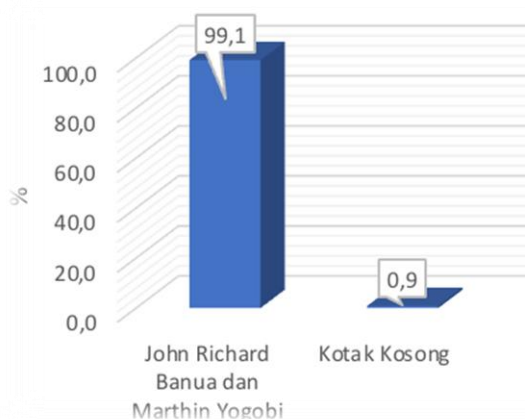
A. Dukungan Partai Politik

Tanggal Pendaftaran	Nama Bakal Pasangan calon	Jalur Pendaftaran	Keterangan
8 Januari 2018	Jimmy Asso-Lemban Kogoya	Partai Politik • PDIP • PAN	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
9 Januari 2018	John Richard Banua-Martin Yogobi	Partai Politik • PBB • PKPI • Nasdem • Demokrat • Golkar • PDIP • Hanura • PAN • PKS	Memenuhi Syarat (MS)
10 Januari 2018	Berto Paragaye-Ronny Elopere	Partai Politik • Gerindra • Hanura	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Gambar 6. Partai Pendukung

Berdasarkan gambar 6 diatas, secara jelas terlihat bahwa JRB diusung oleh sembilan partai politik dan mendapatkan dukungan penuh dari para partai politik tersebut. Sementara, kedua pasangan calon lainnya yang sempat mengajukan diri dan terdaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya, yaitu, Berto Paragaye-Ronny Elopere dan Jimmy Asso-Lembam Kogoya, yang masing-masing dari para calon diusung oleh empat partai politik akhirnya digugurkan oleh KPU karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan aturan Pemilu terkait partai pengusung. Dengan demikian, hanya satu pasangan calon yang lolos dan masuk sebagai kontestan Pilkada serentak tahun 2018 Kabupaten Jayawijaya, dan rivalnya adalah kotak kosong. Meskipun demikian, perjalanan ini tidak begitu mulus karena terjadi pengrusakan terhadap kantor KPU, yaitu 7 kendaraan roda empat dan 2 sepeda motor mengalami kerusakan yang parah, bahkan terdapat korban luka-luka akibat luka panah. Semua ini diakibatkan oleh kekecewaan dari para pendukung yang merasa dirugikan oleh KPU melalui pengumuman KPU yang menyatakan bahwa calon mereka tidak memenuhi syarat dari bakal calon ke calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023.

B. Dukungan Masyarakat



Gambar 7. Perolehan Suara Sah

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar 7, terlihat dengan sangat jelas bahwa dukungan masyarakat terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati John Ricard Banua (JRB) dan Marthin Yogobi sangat signifikan. Keduanya berhasil mengungguli kotak kosong dengan total perolehan suara sah yang diraih sebesar 260.012, sedangkan kotak kosong dengan total perolehan suara sah sebesar 2.271.

Setelah penulis melakukan riset lapangan untuk mengungkap alasan dibalik kemenangan pasangan calon tersebut yang dapat dikatakan hampir 100% didukung oleh masyarakat kabupaten Jayawijaya, ternyata saudara JRB telah melakukan beberapa hal yang dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat. Salah satunya, pasangan calon tersebut membangunkan rumah masyarakat. Akan tetapi, pembangunan tersebut hanya sampai pada tahap fondasi hingga pemasangan senk (atap rumah). Sementara untuk proses selanjutnya, pasangan calon tersebut menjanjikan untuk menyelesaikannya apabila mendapatkan kemenangan ketika Pilkada berlangsung.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan calon tersebut terhadap pembangunan gereja, hingga pembangunan jalan masuk menuju ke distrik. Dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha, tentu pasangan calon tersebut memiliki dana untuk menghadirkan sejumlah alat berat yang digunakan untuk mengerjakan infrastruktur jalan. Namun, lagi-lagi proses pengerjaan sengaja tidak dilakukan sampai selesai, dan pasangan calon tersebut kembali melakukan kesepakatan dengan kepala distrik dan masyarakat. Pengerjaan jalan tersebut akan diselesaikan hingga terhubung ke jalan raya yang menghubungkannya ke distrik Wamena apabila pasangan calon tersebut dipilih saat Pilkada.

Selain itu, pasangan calon tersebut mendatangi para masyarakat yang memiliki

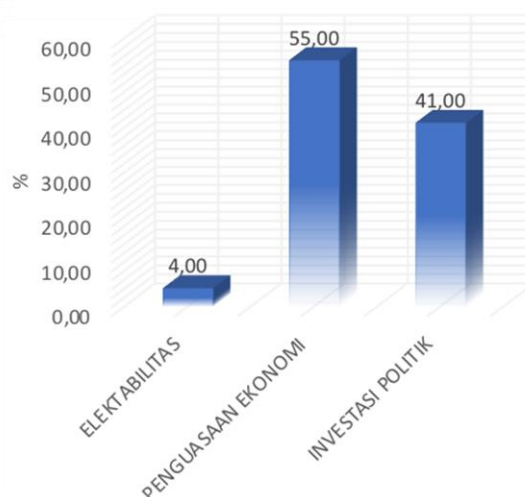
kebun, dan ketika hasil panen seperti ubi-ubian (ipere), labu, keladi, singkong (kasbi), hingga sayuran dan buah, seperti kol bunga, daun, bayam, sayur lili, dan lain-lain, tidak dapat terjual sampai ke pasar karena jarak yang begitu jauh untuk dijangkau dengan hanya berjalan kaki, JRB mendatangi para petani tersebut dan membeli semua hasil kebun. Dengan demikian, hasil kebun yang telah dipanen bahkan yang masih berada di lahan menjadi milik JRB. Lagi-lagi JRB menunjukkan strateginya untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dengan menyatakan bahwa, semua hasil dan isi kebun ini tetap menjadi milik petani untuk kebutuhan makan seluruh keluarga.

Strategi yang dilakukan JRB untuk menarik perhatian masyarakat sejalan dengan strategi yang dilakukan pasangan calon Pilkada di Sawahlunto tahun 2018. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chairunisa, Putri, dan Anggraini (2019), menemukan bahwa pasangan calon Pilkada di Sawahlunto melakukan pemanfaatan dari segi sosial, politik, dan ekonomi, salah satunya dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada para pegawai tambang.

Dengan demikian, temuan-temuan tersebut mendukung temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Su, Thesti, dan Kho Sanjaya (2024), yang menyatakan bahwa praktik politik uang, kekuasaan, dan imbalan yang diberikan kepada masyarakat mampu menggantikan faktor kompetensi yang dimiliki seorang calon kandidat untuk berhasil menduduki jabatan politik. Rendahnya pendidikan politik dan faktor ekonomi menjadikan masyarakat rentan terhadap praktik tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dan semua fakta yang ditemukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa identitas politik lokal yang menjadi dasar hadirnya otonomi khusus di Papua tidak dapat menjamin Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi pemimpin didaerahnya. Bila kondisi ekonomi dan infrastruktur setempat tidak dapat dan mampu dijamin oleh OAP setempat.

C. Faktor Penentu Kemenangan

Berdasarkan hasil survei terhadap opini publik terkait kemenangan pasangan John Richard Banua dan Marthin Yogobi dalam Pilkada serentak tahun 2018, analisis dilakukan menggunakan tiga indikator, yaitu elektabilitas, penguasaan ekonomi, dan investasi politik. Hasil survei tersebut disajikan dalam gambar 8. Peneliti mengambil 250 sampel secara acak (*random sampling*) yang mewakili sejumlah karakteristik atau kategori, termasuk penyelenggara, politisi, pemuda dan mahasiswa, perempuan, serta ASN di lingkungan Pemkab. Jayawijaya. Survei dilakukan secara *online*.



Gambar 8. Faktor Penentu Kemenangan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Periode 2018-2023

Hasil survei publik menunjukkan bahwa, indikator penguasaan terhadap sumber daya ekonomi berada pada persentase tertinggi, yaitu sebesar 55%. Sedangkan, indikator

investasi politik berada pada angka 41%. Kedua indikator tersebut terpaut perbedaan sebesar 14% persen. Temuan ini dapat mengkonfirmasi latar belakang seorang JRB sebagai seorang pebisnis yang terjun kedalam dunia politik, hingga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya selama dua periode, lalu mencalonkan dirinya sebagai Bupati Jayawijaya pada periode berikutnya. Selain itu, JRB juga pernah menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Jayawijaya.

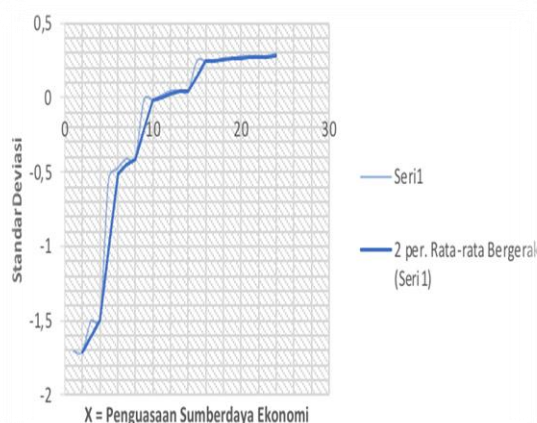
Sederet informasi tersebut dapat membenarkan kapabilitas dan keunggulan JRB dari segi sumberdaya yang dimilikinya, sehingga memungkinkan untuk melakukan pendekatan dan mengambil strategi yang jauh lebih efektif dalam menarik perhatian dan mengambil hati masyarakat Jayawijaya untuk kembali memilihnya sebagai pengganti John Wempi Wetiye yang telah menjabat selama dua periode dan JRB sebagai pendampingnya selama periode tersebut.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Kartika, Adnan, dan Retno (2013), yang mengkaji faktor kemenangan pasangan calon bupati di Kabupaten Pati. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, kemenangan pasangan calon bupati tersebut dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi, kemampuan dalam segi marketing politik, pengorganisasian tim sukses, dan yang paling utama adalah adanya dukungan penuh dari partai politik sebagai kendaraan politik.

3. Analisis

Merujuk pada hasil penelitian diatas yang ditemukan oleh peneliti, selanjutnya data dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan jawaban dan keyakinan terhadap faktor penentu keberhasilan bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Raja Ampat pada tahun 2020, yang dimenangkan oleh Abdul Faris Umlati (AFU) dan Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2018, yang dimenangkan oleh Jhon Richard Banua (JRB). Analisis pengolahan data yang digunakan merujuk pada kerangka analisis data penelitian sosial menurut Sarantakos (1993), dengan cara menguji variabel atau indikator yang saling mempengaruhi.

Asumsinya, bila kedua variabel tersebut saling mempengaruhi, maka akan terlihat hubungan yang tegas melalui pergerakan *scatter diagram* yang bergerak dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Dengan kata lain, kedua variabel yang saling mempengaruhi akan bergerak linear, atau dapat juga dijelaskan bahwa peningkatan pada sumbu Y akan diikuti peningkatan pada sumbu X, dengan demikian hal tersebut menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antar kedua variabel (*strong positive relationship*). Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini akan mensimulasikan variabel dan indikator kedalam sumbu Y dan sumbu X. Sumbu X adalah variabel kemenangan bupati, sedangkan sumbu Y adalah variabel penentu kemengannya. Apabila, keduanya saling mempengaruhi maka akan tergambar dalam kurva positif dan kurva negatif. Hasil analisis tersebut disajikan pada gambar 9 berikut ini.

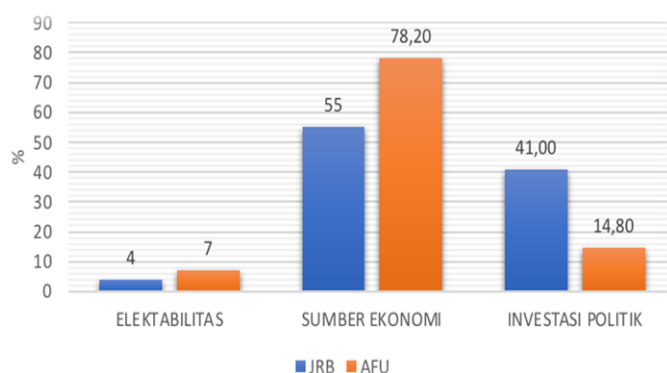


Gambar 9. Hubungan Keberhasilan dan Penguasaan Sumberdaya Ekonomi

Berdasarkan hasil pengolahan data, sebagaimana yang terlihat pada gambar 9 dan gambar 10 maka, dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa faktor penentu kemenangan

bupati di masing-masing kabupaten, sangat ditentukan oleh penguasaan sumber daya ekonomi. Pergerakan arah *scatter* diagram yang bergerak dari pojok kiri bawah menuju pojok kanan atas, serta indikator sumber ekonomi yang menunjukkan presentase tertinggi maka, dapat disimpulkan bahwa antar variabel memiliki hubungan positif yang saling mempengaruhi. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat diartikan bahwa kemenangan sang bupati terpilih didasari oleh kepemilikan terhadap sumberdaya ekonomi politik.

Hasil analisis yang dilakukan mendukung temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Kartika (2019), yang menyatakan bahwa kemenangan seorang calon kandidat dalam pemilu khususnya Pilkada dipengaruhi oleh modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik yang dimiliki oleh calon tersebut. Selain itu, memiliki kedudukan yang mendominasi dari partai politik, organisasi masyarakat, serta pengalaman politik yang telah dibangun sebelumnya, dapat menjadi faktor-faktor pendorong yang sangat kuat bagi calon kandidat dalam memenangkan kompetisi pemilu.



Gambar 10. Indikator Keberhasilan Bupati di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat Tahun 2018 dan Tahun 2020

4. Capaian

Bertolak dari seluruh penjelasan data yang telah dijelaskan sebelumnya maka, terdapat beberapa point yang dijadikan sebagai capaian diantaranya:

- 1) Keberhasilan bupati terpilih tidak didasari oleh elektabilitas, melainkan penguasaan terhadap sumberdaya, seperti penguasaan terhadap finansial dan struktur birokrasi. Hal demikian diperkuat dengan kapasitas bupati terpilih sebelumnya yang merupakan seorang petahana, baik sebagai wakil bupati maupun sebagai bupati. Selain itu, penguasaan terhadap ekonomi ditunjukkan dari profil kedua bupati sebelumnya yang berprofesi sebagai pengusaha (kontraktor) sebelum terjun kedalam Partai Politik (Parpol) sebagai pengurus Parpol.
- 2) Penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi mampu mengikis habis primodialisme kedaerah yang menjadi roh dalam Otsus Papua, sehingga membuka pemahaman baru bahwa Otsus Papua tidak menutup peluang bagi terpilihnya OAP dan bukan OAP. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin di daerah manapun yang ada di Papua. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safiudin (2023), yang juga menyatakan bahwa yang menduduki jabatan wakil bupati atau wakil walikota di Papua haruslah orang asli atau anak adat dari kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial.

KESIMPULAN

Penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi menjadi kunci keberhasilan bupati terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. Serta, terdapat sedikit pengaruh yang bersumber dari faktor investasi politik yang dilakukan oleh Bupati Jayawijaya, JRB. Namun, hasil analisis tetap menunjukkan bahwa penguasaan terhadap sumber daya ekonomi

menjadi faktor yang paling menentukan, karena investasi politik yang dilakukan juga bersumber dari modal finansial. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi dan anggapan yang selama ini terbentuk secara meluas terkait Otonomi khusus Papua yang dipahami sebagai Tuan di Negeri Sendiri adalah sebuah anggapan yang dapat digugat dan terbantahkan secara ilmiah. Penelitian ini membuktikan dan menyarankan kepada semua anak bangsa yang memiliki visi untuk menjadikan Papua yang lebih baik bahwa, semua memiliki potensi dan berpeluang untuk menjadi pemimpin di negeri ini, terkhusus di Papua. Tentu dengan syarat harus memiliki kekuasaan dalam sumber daya ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2023). Regional head elections, high-cost politics, and corruption in Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 44–59. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.8438>
- Chairunisa, W., Putri, I. A., & Anggraini, D. (2019). Pemanfaatan Modal Sosial Deri Astadan Zohirin Sayuti Pada Pilkada Sawahlunto Tahun 2018. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 101–113. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.101-113.2019>
- Kartika, I. (2019). Modal Kandidat Perempuan Dalam Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus: Tjhai Chui Mie Sebagai Walikota Terpilih Di Kota Singkawang). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(1), 91–114. <https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.4297>
- Kartika, Z., Adnan, A., & Retno, N. (2013). Analisis Kemenangan Haryanto-Budiyono dalam Pemilukada Kabupaten Pati. *Jurnal of Politic and Government Studies*, 2(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/2358>
- Komarudin, U., Handoko, W., & Hussain, F. (2025). Money Politics and Voter Behavior: Factors Behind Incumbent Defeat in Subang Regency's 2024 Regional Election. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, 41(2), 216–235. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jh.v41i2.44163>
- Listianingsih, D. M. (2021). Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Fungsi Kaderisasi oleh Partai Politik. *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 123–137. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/26/>
- Romli, M., & Faidi, A. (2025). Urgensi Reformasi Pilkada: Strategi Penguatan Demokrasi Lokal di Era Desentralisasi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1), 155–178. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v13i1.18035>
- Sadiyatunnimah, S. (2021). Capital Comparison Of Candidates From Political Dynasties In The 2020 Mayoral And Deputy Mayoral Election In Indonesia. *Journal of Social Political Sciences*, 2(2), 124–139. <https://doi.org/10.52166/jsps.v2i2.54>
- Safiudin, S. (2023). The Legal Policy Of The Appointments Of Indigenous Papuans In The Regional People's Representative Institutions In Papua. *Poros Hukum Padjajaran*, 4(1), 129–148. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Sarantakos, S. (1993). *Social Research*. Macmillan Education.
- Sari, I., Lestari, A., Syukri, A., & Hanif, N. A. (2025). The Influence of Political, Economic, Cultural, and Social Capital in the Victory of the Noble Family in the 2018 Bone Regency Election. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(1), 933–948. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4521>
- Su, W., Thesti, Y. N., & Kho Sanjaya, V. (2024). Dampak Praktik Serangan Fajar Terhadap Integritas Pemilu Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 4(3), 1412–1482. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2446/1744>
- Susanti, M. H., & Setiajid, S. (2022). The Democratic Anomaly in 2020 Regional Head Elections (PILKADA) with a Single Candidate in Semarang City. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(3), 314–330.

Implikasi penguasaan sumberdaya ekonomi terhadap dirupsi identitas politik lokal (Kajian terhadap penguasaan *economic capital*, *social capital*, dan *political strategy* untuk memenangkan suara pemilih dalam Pilkada serentak Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Jayawijaya)

<https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i3.40403>

Wakhid, A. A., Qohar, A., & Faizal, L. (2017). Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 13(2), 35–47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v13i2.2033>

Wanta, R. B. (2020). Modalitas Dan Strategi Kandidat Pada Pilkada Mitra 2018. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/31438>